ANALISIS KEBIJAKAN MANAJEMEN DALAM PROSES PEMBERIAN KREDIT PENSIUN PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk KANTOR CABANG PALEMBANG

SKRIPSI

Nama : TRI WULANDARI

NIM : 22.2011.306 M

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

2015

ANALISIS KEBIJAKAN MANAJEMEN DALAM PROSES PEMBERIAN KREDIT PENSIUN PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk KANTOR CABANG PALEMBANG

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Nama : TRI WULANDARI

NIM : 22.2011.306 M

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

2015

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Tri Wulandari
Nim	: 22 2011 306 M
Program Studi	: Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, Agustus 2015

Penulis

METERAI TEMPEL

TGL. 20

5454FADF251307309

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Tri Wulandari

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	**: Analisis Kebijakan Manajemen Dalam Proses Pemberian Kredit Pensiun PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk Kantor Cabang Palembang**
Nama	**: Tri Wulandari**
Nim	**: 22 2011 306 M**
Fakultas	**: Ekonomi Dan Bisnis**
Program Studi	**: Akuntansi**
Konsentrasi	**: Sistem Pengendalian Manajemen**

Diterima dan disahkan
Pada tanggal,

Pembimbing

Mizan, S.E.,M.Si.,Ak.,CA
NIDN/NBM: 0206047101/859196

Mengetahui
Dekan
u.b ketua prodi studi akuntansi

Rosalina Ghazali, S.E.,Ak.,M.Si
NIDN/NBM: 022815802/1021961

Motto :

" BERSUNGGUH – SUNGGUHLAH TERHADAP APA YANG KAMU KERJAKAN, BERUSAHALAH SELAGI BISA DAN YAKINLAH ALLAH SWT AKAN MEMBERIKANMU JALAN YANG TERBAIK ☺."

Kupersembahkan Kepada :

- Ayahanda dan Ibunda Tercinta yang telah memberikan dukungan, cinta dan kasih sayang serta do'a demi keberhasilanku.
- Adikku tersayang.
- Yuria'ku tersayang.
- Dosen berserta Almamaterku Universitas Muhammadiyah Palembang.

Sahabat serta teman –teman seperjuanganku

PRAKATA

Alhamdulilahirobbil a'lamiin, Segala puji dan rasa syukur atas rahmat, karunia serta kehadirat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul " Analisis Kebijakan Manajemen Dalam Proses Pemberian Kredit Pensiun PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk Kantor Cabang Palembang" ini dapat penulis selesaikan tepat waktu.

Kebijakan manajemen ditetapkan dalam proses pemberian kredit Pensiun bertujuan untuk mempermudah calon debitur / debitur untuk dapat dilayani kredit yang diajukan, sedangkan bagi pihak bank agar dapat mempunyai acuan yang efektif dan benar dalam pemberian kredit kepada calon debitur / debitur. Adanya proses pemberian kredit Ini diupayakan untuk mencengah terjadinya kredit macet yang merugikan pihak Bank.

Untuk itu Bank Tabungan Pensiun Nasional harus memperhatikan dan mempertimbangkan prosedur yang berlaku dalam proses pemberian kredit agar tidak terjadinya kredit macet (piutang tak tertagih).Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan bahwa " Bagaimanakah Kebijakan Manajemen Dalam Proses Pemberian Kredit Pensiun PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk Kc Palembang?"

Ucapan terimakasih, penulis sampaikan kepada Allah SWT yang senantiasa memberiku kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini, kedua orang tuaku tercinta, adikkku tersayang , Yuria'ku tersayang, yang telah mendidik, membiayai, mendo'akan, dan memberikan dorongan, dukungan serta semangat kepada penulis. Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada Bapak

Mizan.S.E.Ak.,M.Si, yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran – saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, disampaikan juga terimakasih kepada pihak – pihak yang telah memberi izin, membantu penulis dalam peyelesaian studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak DR.H.M. Idris,S.E,M.Si selaku rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan / karyawati.
2. Bapak Abid Djazuli S.E,M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Ibu Rosalina Ghozali,S.E.Ak.,M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi beserta Pembimbing Akademik Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Agus Surianto selaku Pimpinan PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk. Kc Palembang.
5. Sahabat tercinta di PT. Bank Tabungan PensiunanNasionalTbkCabang Palembang.
6. Semua teman-teman seperjuangan angkatan 2011 dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih untuk perkenalan, persahabatan dan persaudaraan yang telah terjalin erat diantara kita semua selama ini.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO iv

HALAMAN PRAKATA& UCAPAN TERIMA KASIH v

HALAMAN DAFTAR ISI viii

HALAMAN DAFTAR TABEL x

HALAMAN DAFTAR GAMBAR xi

HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN xii

ABSTRAK xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Perumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 9

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya 11

B. Landasan Teori

1. Teori Kredit 12

a. Pengertian Kredit..... 12

b. Unsur – Unsur Kredit..... 13

c. Tujuan dan Fungsi Kredit 14

d. Jenis – Jenis Kredit 16

e. Prinsip Pemberian Kredit 20

2. Kebijakan Manajemen

a. Pengertian Kebijakan Manajemen 24

b. Tujuan Kebijakan Manajjemen 30

3. Prosedur Dalam Proses Pemberian Kredit 30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 37

B. Tempat Penelitian 38

C. Operasionalisasi Variable 38

D. Data Yang Diperlukan 39

E. Teknik Pengumpulan Data 40

F. Analisis Data dan Teknik Analisis 41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk ... 42

2. Visi dan Misi PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk 43

3. Struktur Organisasi 43

4. Uraian Tugas dan Wewenang 44

B. Pembahasan Hasil Penelitian 61

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan 66

B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

TABEL I. 1 Daftar Komposisi Kredit Pensiun Berdasarkan Kolektibilitas Pada PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk 7

TABEL III. 1 Operasionalisasi Variabel 38

TABEL IV. 1 Data Pengumpulan Informasi pada proses pemberian kredit.... 63

TABEL IV. 2 Data Persentase Penggunaan Media Penyelamatan Kredit Macet Pada PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk 64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Riset dari Tempat Penelitian

Lampian 2 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi

Lampiran 3 Sertifikat TOEFL

Lampiran 4 Sertifikat KKN

Lampiran 5 Biodata Penulis

ABSTRAK

Tri Wulandari/ 222011306M/ 2015/ Analisis Kebijakan manajemen Dalam Proses Pemberian Kredit Pensiun PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk. Kc Palembang.

Perumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kebijakan manajemen Dalam Proses Pemberian Kredit Pensiun PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk. Kc Palembang.

Penelitian ini adalah jenis penelitian komparatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui serta membandingkan kebijakan manajemen dalam proses pemberian kredit Pensiun apakah telah benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Undang – Undang Perbankan. Data yang digunakan adalah data primer, dan teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah teknik dengan pengamatan (observasi), wawancara dan dokumentasi yang berhubungan dengan proses pemberian kredit Pensiun. Metode Analisis yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu menganalisis kebijakan manajemen dalam proses Pemberian Kredit Pensiun PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk. Kc Palembang. Penelitian ini bermanfaat Bagi PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk. Kc Palembang sebagai bahan penambah informasi dan bahan masukan akan kemajuan perusahan, khususnya dalam rangka perbaikan terhadap kebijakan manajemen dalam proses pemberian kredit Pensiun dapat lebih efektif.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem pemberian kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk. Kantor Cabang Palembang masih kurang memperhatikan dan mempertimbangkan prosedur yang sudah ada dalam proses pemberian kredit Pensiun secara efektif untuk menghindari terjadinya kredit macet (piutang tak tertagih).

Kata Kunci : ***Kebijakan Manajemen Dalam Proses Pemberian Kredit Pensiun.***

ABSTRACT

Tri Wulandari /222011306M/2015/ An analysis of management policy on the gift of retired credit process at National retired gift bank limited company of Palembang Branch Office.

This research was formulated on the following question:"How is Management Policy on the gift of retired credit process at Nasional retired gift bank limited company of Palembang Branch Office.

This was such a comparative research which was used to figure out and compare the management policy of the gift of retired credit whether or not it was in accordance with banking constitutions.

The data used in this research were primary data and secondary data and the technique for collecting the dta was through observation,interview and documentation in relation to the process of giving retired credit. The method that usedin this study was through qualitative analysis which used toanalyze the management policy on the gift of retired credit process at National Retired gift bank limited company of Palembang Branch Office. This research can be used as a good reference for the development of the corporate, particularly in improving the effective management policy on the gift of retired process. The result showed that the system of giving the credit by National Retired gift Bank Limited company of Palembang Branch Office was still less to pay more on the former procedures in order to avoid the stuck credit.

Keywords: Management policy in the process of giving retired credit

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut asal mula kata "kredit" dari kata *Credere* yang artinya adalah kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit maka berarti mereka memperoleh kepercayaan. Sedangkan bagi si pemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali. Pengertian "kredit" menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah "penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Kredit dapat pula diartikan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Fungsi kredit antara lain meningkatkan daya guna uang dan barang, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, alat stabilitas moneter, sarana pemerataan pendapatan, memperluas hubungan internasional, dan meningkatkan kegiatan berusaha.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, bank seyogyanya mengoptimalkan penyaluran kredit kepada para nasabah. Namun kredit yang diberikan oleh bank tidak menutup kemungkinan mengandung risiko,

sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat serta memiliki fundamental yang lebih kuat.

Agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat.Salah satu indikasi yang terkadang menjadi suatu masalah dalam perbankan adalah bahwa tidak hanya sekedar menyalurkan kredit saja, melainkan bagaimana kredit tersebut dapat kembali sesuai dengan jangka waktu dan imbalan bunga yang telah disepakati kedua belah pihak. Karena itu hal yang menggolongkan suatu bank dikatakan sehat apabila dalam penyaluran dan pengembalian kredit, keduanya dapat berjalan lancar dan terus mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.Berjalannya kegiatan perkreditan akan lancar apabila adanya saling mempercayai dari semua pihak yang terkait dalam kegiatan tersebut. Kegiatan itu pun dapat terwujud hanyalah apabila semua pihak terkait mempunyai integritas moral.

Kecenderungan kerugian yang timbul dalam perkreditan akibat tingginya jumlah kredit macet karena kurangnya perhatian bank secara serius setelah kredit tersebut berjalan. Faktor lain yang cukup penting adalah sangat minimnya analisis yang dilakukan bank pada saat pengkajian jumlah kredit yang tepat sesuai ketentuan PKS dan kesanggupan debitur tersebut.

Pemberian kredit merupakan kegiatan utama suatu bank yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan bank, sehingga dalam pengamanannya diperlukan tindakan-tindakan yang tepat, tertib dan teratur terutama bagi kredit yang dikategorikan bermasalah, karena itu setiap bank harus

ekstra hati-hati dan bekerja optimal agar kesehatan dan kelangsungan kepercayaan masyarakat kepada bank tersebut tetap terpelihara.

Di satu sisi, kredit merupakan bisnis utama bank, namun di sisi lain kredit juga menjadi penyebab utama bangkrutnya bank. Berdasarkan survey atas 200 bank internasional yang bangkrut pada tahun 1987 ternyata masalah perkreditan menduduki rengking pertama penyebab kegagalan bank. Analisis kredit atau penilaian kredit adalah suatu proses yang dimaksud untuk menganalisis atau menilai suatu permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur, sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa proyek yang akan dibiayai dengan kredit bank cukup layak. Dengan adanya analisis kredit ini dapat mencegah kemungkinan terjadinya *default* oleh calon debitur. *Default* dalam hal ini merupakan kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit yang diterimanya (angsuran pokok) beserta bunga yang telah disepakati bersama.

PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk Kantor Cabang Palembang merupakan salah satu lembaga keuangan yang memperoleh pendapatan berupa bunga yang diterima dari debitur. Dengan adanya kegiatan pemberian kredit, maka bank sekaligus memasarkan produk-produk bank lainnya seperti giro, tabungan, deposito, kiriman uang (Transfer) dan lain sebagainya.

Dalam perkembangannya rata-rata semua bank telah menerapkan kredit dengan jaminan untuk menghindari terjadinya resiko debitur tak tertagih sehingga mengikat tetapi pada kenyataannya masih banyak jumlah kredit macet yang berstatus kolektabilitas tinggi maupun rendah seperti yang terjadi di Bank

Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. Bank yang telah berdiri kurang lebih 57 tahun dan telah melayani berjuta masyarakat indonesia khususnya para purna bakti atau pensiunan, dengan memberikan program Kredit Pensiun sebagai sektor daya tumbuh kembang usaha maupun multiguna.

Perguliran Kredit Pensiun dimulai dengan adanya niat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan bagi masyarakat adil dan makmur berdasarkan undang-undang 1945 yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan jalan menghidupkan serta memajukan semangat menabung dan memberikan kesempatan menyimpan (Tabungan/Deposito) dan memberikan pinjaman uang dengan suku bunga yang layak kepada Purnawirawan ABRI dan Pensiunan lainnya (khususnya dari pensiun untuk pensiun), serta badan hukum yang didirikanatau dipimpin oleh para pensiunan dan para purnawirawan, warga indonesia pada umumnya.

Memberikan Kredit pada Purnawirawan ABRI dan Pensiunan lainnya,sesuai dengan Surat Ketetapan Mentri Keuangan RI No.Kep.975/MK/I/I/1976 tanggal 17 Juli 1976 pada Warga Negara Indonesia, Pada umumnya pelaksanaan dilakukan menurut bimbingan Bank Indonesia dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. BTPN Turut membantu Pemerintah dalam rangka mengurangi pinjaman gelap yang sasarannya khusus ditunjukkan pada masyarakat Pensiunan. Mendirikan dana sosial dalam arti kata yang luas untuk kesejahteraan masyarakat pensiunan serta membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan umum, baik dalam bidang ekonomi,sosial maupun dalam rangka keamanan guna tercapainya

stabilisasi ekonomi Negara serta mewujudkan masyarakat adil dan makmur dengan Surat Keputusan tanggal 2 Desember 1986 No.Kep/135/KM/II/1986, Mentri Keuangan RI telah Memberkana Izin Kepada Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) NPWP 1139.7973-423 untuk melakukan usaha Bank Tabungan sebagai kelanjutan usaha perkumpulan BAPEMIL yang pusat kedudukannya di Bandung. Atas diajukannya permohonan pinjaman Kredit Pensiun dengan menjaminkan Skep Pensiun Asli dan memotong manfaat pensiun bulanan yang bersangkutan. Pada tempat yang dilakukan penelitian ini yaitu PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. khususnya Kantor Cabang Palembang telah mempunyai kebijakan yang telah disepakati bahwasanya pinjaman Kredit Pensiun wajib menyerahkan jaminan atau agunan atas kredit yang akan diajukan oleh debitur dan mendebet langsung manfaat gaji bulanan atau melakukan pemotongan dengan cara bekerja sama dengan mitra-mitra dana pensiun untuk memotongkan langsung gaji yang bersangkutan untuk angsuran bulanan.

Tetapi pada kenyataannya masih saja banyak terjadi jumlah kredit yang tak tertagih atau tak terpotong yang disebabkan oleh berbagai macam kelalaian dari pengelola yg dalam hal ini berkaitan dengan kebijakan management bank Btpn itu sendiri mulai dari kesesuaian syarat, pemrakarsa kredit, analisa kredit,kewenangan pemberian kredit,type,struktur dan syarat kredit yang sesuai ketentuan sampai dengan pencairan dan proses mutasi gaji dan konfirmasi pembayaran melalui mitra yang baik dan benar.Oleh karena itulah perbankan sangat rentan akan kredit macet yang disebabkan oleh berbagai macam faktor kebijakan yang tidak sesuai dengan apa yang telah tercantum diPKS.

Faktor kebijakan yang tidak sesuai itulah sangat mempengaruhi terhambatnya pemotongan angsuran yang menyebabkan kredit macet,seperti halnya dapat berdampak diproses pemotongan kredit yang terhambat dan tak tertagih,sedangkan kredit sehat harus mempunyai alur pemotongan yang lancar dimana baki debet terjadi apabila uang setiap bulan dan tanggal jatuh temponya telah tersedia di rekening masing-masing nasabah. Sedangkan yang sering terjadi di BTPN banyaknya nasabah yang tidak melakukan penarikan tunai gaji dimitra-mitra pos sehingga dianggap tidak mengambil gaji dan piutang pun tak tertagih,serta rentannya keterlambatan proses mutasi gaji dan pemutusan transfer gaji-gaji pensiun dikarenakan nasabah tidak mengambil gaji lebih dari 5 bulan dan masalah lainnya ,untuk mengetahui berapa jumlah nasabah yang tidak mengambil gaji dikantor pos, saya mendapatkan data dari bank btpn kantor cabang Palembang sebagai lampiran,hal tersebut memberiakan gambaran yang salah satu factor penyebab kredit macet.dan kolektabilitas yang cukup tinggi di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk Kantor Cabang Palembang.

Untuk mengetahui lebih jauh perkembangan penyaluran Kredit Pensiun PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk. Kantor cabang Palembang pada tabel I.1 berikut:

Tabel I.1

Komposisi Kredit Pensiun yang diberikan berdasarkan kolektibilitas pada PT.Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. Kantor Cabang Palembang

Periode Tahun 2010 – Tahun 2014

Koleksibilitas Kredit	**Tahun 2010**	**Tahun 2011**	**Tahun 2012**	**Tahun 2013**	**Tahun 2014**
Lancar	100.108.380.567	100.080.823.000	80.935.416.125	106.186.832.250	122.190.967.500
Dalam Perhatian khusus	1.060.522.420	1.180.654.200	935.946.650	1.233.117.750	2.035.900.450
Kurang lancar	760.106.499	690.027.000	501.028.900	985.572.650	993.650.000
Diragukan	311.144.537	243.577.650	222.270.650	452.124.450	557.750.600
Macet	124.280.000	113.666.800	101.449.051	227.090.600	394.655.670
Total Piutang (Outstanding)	102.364.432.023	102.308.748.650	82.696.111.376	109.084.737.700	126.172.924.220

Sumber : Kantor BTPN cabang Palembang 2015

Berdasarkan data tersebut kategori lancar dari Tahun 2010 ke Tahun 2014 mengalami kenaikan hanya saja pengalami penurunan sedikit ditahun 2011 dan pada Tahun 2012 kembali turun dan di tahun 2013 dan 2014 mengalami peningkatan kembali. Pada kredit dalam perhatian khusus dari tahun 2010 sampai dengan 2011 mengalami peningkatan di tahun 2012 Mengalami penurunan. Begitu pula pada kredit kurang lancar di tahun 2011 dan 2012 mengalami penurunan, dan meningkat kembali pada tahun berikutnya. Selanjutnya kredit dalam kolektibilitas diragukan, mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya dan meningkat kembali ditahun 2013 dan 2014. Pada kategori macet

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul "Analisis Kebijakan Manajemen Dalam Proses Pemberian Kredit Pensiun PT.Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk Kantor Cabang Palembang".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah "Bagaimanakah kebijakan manajemen pada proses pemberian Kredit Pensiun PT.Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk Kantor Cabang Palembang?".

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah "Untuk mengetahui kebijakan manajemen dalam proses pemberian kredit yang sesuai dengan asas perkreditan yang sehat pada Kredit Pensiun PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. Kantor Cabang Palembang.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Bagi penulis

   Sebagai bahan masukan dan tambahan pengetahuan khususnya mengenai kebijakan manajemen dalam proses pemberian Kredit Pensiun pada PT.Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk. Kc Palembang.

2. Bagi Pihak Bank

   Sebagai bahan menambah informasi dan bahan masukan akan kemajuan perusahaan, khususnya dalam rangka perbaikan terhadap kebijakan manajemen dalam proses pemberian kredit Pensiun dapat lebih efektif.

3. Bagi Almamater

Sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian pada objek yang sama.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya berjudul Tinjauan Atas Analisis Kebijakan Piutang untuk mengurangi Piutang Tak Tertagih pada Bank Pekreditan Rakyat yang penelitiannya dilakukan oleh Ria Riski (2013). Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah kebijakan yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi piutang tak tertagih pada Bank Perkreditan Rakyat.

Penelitian yang berikutnya berjudul Pelaksanaan Analisis Pemberian Kredit di PT. BANK HAGA Cabang Semarang yang penelitiannya dilakukan oleh Tri Wahyuni (2012). Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah meninjau sejauh mana keabsahaan data-data yang menjadi syarat perkreditan untuk pelaksanaan pemberian kredit di Bank Haga Cabang Semarang.

Penelitian selanjutnya yaitu berjudul Analisis Kebijakan Pemberian Kredit dan Pengaruh LDR,CAR dan Min Terhadap NPL pada Bank Perkreditan Rakyat yang penelitiannya dilakukan oleh Khadijah Nurani (2013). Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Apakah kebijakan pemberian kredit mempengaruhi loan to deposit rasio,Car dan Min Terhadap NPL pada Bank Perkreditan Rakyat.

Adapun tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi piutang tak tertagih pada masing-masing bank. Operasiolisasi variabel yang digunakan adalah kebijakan

piutang yang ada pada masing-masing bank, data yang digunakan berupa data kualitatif serta teknik analisis data.

Hasil penelitian ini telah melakukan aktivitasnya dalam pemberian kredit. Namun pada kenyataannya perusahaan dalam melakukan penjualan kredit belum melaksanakan dan menjalankan pemberian kredit tersebut dengan baik, sehingga menimbulkan peningkatan piutang tak tertagih. Membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama –sama membahas tentang kebijakan yang dilakukan manajemen dalam pemberian kredit dalam pencegahan timbulnya jumlah kredit macet atau piutang tak tertagih.

B. Landasan Teori

1. Teori Kredit

a. Pengertian Kredit

Menurut Kasmir (2012 : 112) dalam bahasa latin kredit disebut "*credere*" yang artinya *percaya*. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.

Pengertian kredit menurut Undang – Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihk peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

b. Unsur – Unsur Kredit

Dalam kata kredit mengandung berbagai maksud. Atau dengan kata lain dalam kata kredit terkandung unsur – unsur yang direkatkan menjadi satu. Sehingga jika kita bicara kredit, maka termasuk membicarakan unsur – unsur yang terkandung di dalamnya. Menurut Kasmir (2012 : 114) Adapun unsur – unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

   Kepercayaan yaitu suatu keyakinan bagi kreditur bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, jasa atau barang) akan benar – benar diterimanya kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit.

2. Kesepakatan

   Disamping unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara kreditur dengan debitur. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing–masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing–masing.

3. Jangka waktu

   Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah

disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (dibawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) dan jangka panjang (diatas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak.

4. Resiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar resikonya, demikian pula sebaliknya.

5. Balas jasa

Balas jasa bagi bank merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bagi bank.

c. Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentuya tergantung dari tujuan bank itu sendiri.Tujuan pemberian kredit juga tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan.Dalam praktiknya tujuan pemberian suatu kredit menurut (Kasmir : 2012) adalah sebagai berikutsebagai berikut:

1. Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan pada nasabah.

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang membutuhkan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja dan kegiatan multiguna yang bertujuan meringankan beban debitur tersebut. Dengan dana itu maka pihak debitur dapat mengembangkan dan memperluas usahanya dan membantu kegiatan ekonomi yang bersangutan untuk mendapatkan tarap hidup yang lebih baik lagi.

3. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang diberikan oleh pihak bank, maka semakin meningkatkan jumlah kegiatan ekonomi yang akan terjadi. Mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan berbagai sektor. Organisasi bank dalam kehidupan perekonomian yang modern, banyak memegang peranan yang sangat penting sehingga bank selalu di ikut sertakan dalam menentukan kebijakan di bidang moneter. Hal ini menyebabkan, bank mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam bidang kehidupan khususnya di bidang ekonomi. Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain menurut Suyatno (2010) sebagai berikut :

a). Kredit pada hakekatnya dapat meningkatkan daya guna uang.

b). Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalulintas uang.

c). Kredit dapat pula meningkatkan daya guna peredaran barang.

d). Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.

e). Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha.

f). Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan.

g). Kredit sebagai alat meningkatkan hubungan internasional.

d. Jenis – Jenis Kredit

Beragamnya jenis usaha, menyebabkan beragam pula kebutuhan akan dana yang beragam menyebabkan jenis kredit juga menjadi beragam. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dana yang diinginkan nasabah.

Dalam praktiknya kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Secara umum jenis – jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi menurut Kasmir (2012) antara lain :

1. Dilihat dari segi kegunaan kredit

a). Kredit investasi

Kredit investasi yaitu kredit jangka panjang yang biasanya untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek baru untuk keperluan rehabilitasi. Contohnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin.

b). Kredit modal kerja

Kredit modal kerja yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh kredit

modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji atau biaya - biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit produktif

Kredit produktif yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi. Sebagai contoh kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang dan kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian.

b. Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabot rumah tangga.

c. Kredit perdagangan

Kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangan seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor impor.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan, misalnya kredit peternakan ayam.

b. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk.

c. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan dan multiguna lainnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan.

4. Dilihat dari segi sektor usaha

a). Kredit pertanian

Kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian.

b). Kredit industri

Kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, industri menengah atau industri besar.

c). Kredit pertambangan

Kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak atau timah.

d). Kredit pendidikan

Kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau berupa kredit untuk pembiayaan pendidikan.

e). Kredit perumahan

Kredit untuk membiayai pembangunan perumahan dan biasanya berjangka waktu panjang.

5. Dilihat dari segi jaminan

a). Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan calon debitur.

b). Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang. Kredit jenis ini diberikan dengan menilai dan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

pembayaran atas segala kewajiban yang ada. Beberapa hal yang harus diteliti didalam analisis watak nasabah adalah riwayat hubungan dengan bank, antara lain:

1. Riwayat peminjam
2. Reputasi dalam bisnis dan keuangan
3. Manajemen
4. Legalitas usaha
5. *Capacity*

Setelah aspek watak maka faktor berikutnya yang sangat penting dalam analisis kredit adalah faktor kemampuan. Jika tujuan analisis watak adalah untuk mengetahui kesungguhan nasabah melunasi hutangnya, maka tujuan analisis kemampuan adalah untuk mengukur kemampuan membayar. Kemampuan tersebut dapat diuraikan kedalam kemampuan manajerial dan kemampuan finansial. Kedua kemampuan ini tidak dapat berdiri sendiri. Karena kemampuan finansial merupakan hasil kerja kemampuan manajerial perusahaan.

b). Capital

Modal sendiri (ekuitas) merupakan hak pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih antara aktiva dengan kewajiban yang ada. Pada dasarnya modal berasal dari investasi pemilik ditambah dengan hasil usaha perusahaan. Analisa modal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memikul beban pembiayaan yang dibutuhkan dan

kemampuan dalam menanggung beban resiko yang mungkin dialami perusahaan.

c). Collateral

Unsur lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam analisis kredit adalah *collateral* (agunan). Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

d). Condition

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar–benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Penilaian kredit dengan menggunakan 7P menurut Kasmir (2012) adalah sebagai berikut:

1). *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah laku sehari–hari maupun kepribadian masa lalu. Penilaian *personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

2). *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan–golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Nasabah yang digolongkan kedalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3). *Purpose*

Yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam–macam sesuai kebutuhan, sebagai contoh apakah untuk modal kerja, investasi, konsumtif, produktif dan lain–lain.

4). *Prospect*

Yaitu menilai usaha nasabah di masa akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting, mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya pihak bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.

5). *Payment*

Yaitu ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau sumber dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.

6). *Profitability*

Yaitu menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7). *Protection*

Yaitu bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.

2. Kebijakan Manajemen

a. Pengertian Kebijakan Manajemen

Menurut Arief Suadi (2012) kebijakan manajemen merupakan pernyataaan manajemen untuk menuju kepada visi dan misi yang diperkirakan dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu dan hasilnya dapat diukur. Untuk mencapai tujuan tersebut maka kebijakan manajemen perusahaan dilaksanakan oleh semua bagian dari perusahaan dengan pedoman pada dokumen - dokumen pelaksanaan. Semua dokumen tersebut harus disosialisasikan pada semua karyawan sesuai area kerja masing – masing.

Jika kebijakan itu diimplementasikan dalam manajemen perusahaan maka perusahaan itu akan berjalan lebih sehat dan teratur serta segala bentuk keterlambatan (pembayaran kredit) dalam hal ini tidak akan terjadi. Adapun

pengertian implementasi kebijakan merupakan tindakan – tindakan yang dilakukan baik oleh individu / kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan – tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Kebijakan manajemen itu sendiri harus jelas antara kebijakan dari atas kebawah sebagai pelaksanaannya, dan etika kebijakan itu telah diberikan dan dilaksanakan tetapi tidak konsekuen, pada ahirnya maka harus ada punishment terhadap yang melanggar dari kebijakan itu, sehingga tercapai tujuan kebijakan awal itu untuk apa dan bagaimana.

Puspani (2010) berpendapat, bahwa Setiap KPB (Kebijakan Perkreditan Bank) yang dibuat bank wajib memuat dan menetapkan dengan jelas dan tegas prinsip kehati - hatian (*prudent approach*) yang minimal harus meliputi kebijakan pokok perkreditan. Pokok-pokok pengaturan pemberian kredit, sektor pasar, kredit yang perlu dihindari, tatacara penilaian mutu kredit serta professionalisme dan integritas pejabat perkreditan Puspani (2010 : 17) :

1). Kebijakan Pokok Perkreditan (KPP) yang harus memuat pokok-pokok pengaturan mengenai :

a). Sistem dan prosedur perkreditan yang sehat, prosedur persetujuan pemberian kredit, administrasi dan dokumentasi kredit,serta sistem dan prosedur pengawasan kredit.

b). Sistem dan prosedur kredit-kredit yang harus mendapatkan perhatian khusus dan pencadangan kredit.

c). Sistem dan prosedur kredit yang bunganya dikapitalisir (plafondering) .

d). Sistem dan prosedur penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah dan penghapusbukuan (*Write-off*) kredit macet.

e). Tara cara penyelesaian barang-barang bangunan kredit yang dikuasai bank.

2). Pokok-pokok pengaturan pemberian kredit yang menerapkan :

a.) Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan jumlah modal bank.

b). Tara cara penyediaan kredit yang dikonsorsiumkan, diindikasikan dan *risk sharing* dengan bank-bank lain.

c). Persyaratan kredit (bunga jenis bentuk kredit, angsuran dan jaminan). Kebijakan bank dalam kredit, khusus tentang BMPK, bilamanana me-Lampauinya.

3). kredit yang perlu dihindari antara lain :

a). kredit untuk tujuan spekulasi.

b). Kredit untuk usaha informasi keuangan.

c). Kredit usaha yang perlu keahlian khusus,dimana bank tidak punya.

d). Kredit untuk usaha yang telah bermasalah/macet/planfondering.

4). Tatacara penilaian mutu kredit.

Menurut Sutejo (2010 : 15) tentang mutu kredit adalah: "Salah satu syarat bank dapat menjaga mutu kredit yang akan dan telah mereka salurkan, adalah memiliki kebijaksanaan kredit tertulis (*written loan policy)* yang disusun secara profesional, dan selalu disesuaikan dengan perkembangan situasi bisnis dan ekonomi moneter negara". Bank harus membuat sistem dan prosedur atau tatacara penilaian kolektibilitas kredit

yang harus dimuat dalam KPP setiap bank dan harus sesuai dengan ketentuan BI dalam SE No. 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991 yang menetapkan kolektibilitas kredit sebagai keadaan pembayaran pokok/angsuran pokok, bunga, biaya-biaya dan kemungkinan diterima kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya.

5). Professionalism dan Intregritas Pejabat Kredit

Para pejabat kredit bank harus menyadari dan memahami Bab VIII pasal46 s/d 53 UU No. 7 tahun 1992 sebagai dasar etika perkreditan bank yang mengharuskan pejabat perkreditan, wewenang dan tanggungjawab setiap orang atau unit kerja yang terlibat dalam proses kegiatan perkreditan (KPP), Komite Kredit (KK), Dewan Komisaris (DK), Direksi Bank dan satuan kerja perkerditan (SKP) dan lain-lainnya.

6). Prinsip Kehati-hatian dalam Undang-Undang Perbankan

Menurut Mulyadi (2011) dalam bukunya, prinsip kehati-hatian *(prudent banking principle)* adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank menjalankan fungsi atau kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati *(prudent)* dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padany. Hal ini disebutkan dalam pasal 2 UU No. 10 tahun 1998 sebagai perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Kebijakan

Perkreditan Bank (KPB) dalam prinsip kehati-hatian perkreditan, menurut Tawaf (2009), berkaitan dengan:

a). Kebijakan pokok perkreditan.

(1). Prosedur kredit yang sehat.

(2). Kredit yang mendapat perhatian khusus.

(3). Perlakuan kredit yang plafondering.

(4). Prosedur penyelesaian kredit bermasalah, pengahapusbukuan, dan pelaporan kredit macet.

(5). Tata cara penyelesaian barang agunan kredit

b). Kebijakan bank dalam pemberian kredit pada pihak terkait.

(1). Batasan jumlah maksimum kredit yang diberikan.

(2). Tata cara penyediaan kredit.

(3). Persyaratan kredit.

(4). Kebijakan pemenuhan ketentuan perkreditan.

c). Pemecahan kredit yang perlu dihindari bank.

d). Tata cara penilaian kualitas kredit, hasil penilaian kolektibilitas kredit telah sesuai dengan ketentuan BI.

7). Organisasi Manajemen Perkreditan

Hal-hal yang berkaitan dengan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) organisasi dan manajemen perkreditan (Tawaf, 2009) adalah sebagai berikut:

a). Organisasi dan manajemen perkreditan harus menjabarkan wewenang dan tanggung jawab perangkat organisasi dan setiap pejabat bank yang

terkait dalam perkreditan.

b). Dewan komisaris dan direksi setiap bank wajib memiliki Komite Kebijakan Perkreditan Bank (KKP) dan Komite Kredit (KK).

8). Kebijakan Persetujuan Kredit

Hal-hal yang berkaitan dengan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) persetujuan kredit menurut Tawaf (2009) adalah sebagai berikut:

a). Konsep hubungan total permohonan kredit, persetujuan kredit didasarkan atas penilaian seluruh kredit dari permohonan kredit yang telah diberikan

b). Penetapan batas wewenang persetujuan kredit, harus dituangkan secara tertulis melalui keputusan direksi yang memuat jumlah kredit dan pejabat kredit yang ditunjuk.

c). Proses persetujuan kredit, sekurang-kurangnya mencakup:

(1). Permohonan tertulis dan dokumen lengkap

(2). Analisi kredit yang lengkap dan obyektif

(3). Rekomendasi persetujuan kredit yang sesuai dengan analisis.

Pemberian persetujuan kredit dengan memperhatikan analisis dan rekomendasi.

d). Perjanjian kredit harus tertulis dalam bentuk dan format yang ditetapkan masing – masing bank. Perjanjian kredit berisi syarat kredit, jumlah kredit, jangka waktu, dan tata car a pembayaran.

e). Persetujuan kredit diberikan apabila semua syarat kredit telah dipenuhi.

1). Pengajuan proposal hendaknya berisi :

a). Latar belakang Dana Pensiun yang diterima dituangkan dalam Skep Pensiun Asli yang akan dijaminkan pada saat akad kredit dalam suatu proposal, jenis bidang unit kerja, identitas perusahaan yang ada dikartu identitas pensiun dan skep yang terbit, nama pengurus berikut alamat dana pensiun.

b). Maksud dan tujuan apakah untuk multiguna atau untuk usaha

c). Besarnya kredit dan jangka waktu. Dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditya. Penilaian kelayakan besarnya kredit dapat kita lihat dari daftar gaji pension yang diterima setiap bulannya serta usia .untuk pengajuan untuk keperluan modal usaha dapat melampirkan foto jenis usaha yang ada,sehingga untuk jumlah pinjaman dapat mempengaruhi besarannya. Jika dari hasil analisis tidak sesuai dengan permohonan, maka pihak bank tetap berpedoman terhadap hasil analisis mereka dalam memutuskan jumlah kredit dan jangka waktu kredit yang layak diberikan kepada si pemohon.

(1). Cara pemohon mengembalikan kredit, maksudnya dijelaskan secara rinci cara – cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya.

(2). Jaminan kredit. Merupakan jaminan untuk menutupi segala risiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit, baik yang

ada unsur kesengajaan atau tidak. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu, dan sebagainya. Biasanya jaminan dilihat dengan suatu asuransi tertentu.

2). Melampirkan dokumen – dokumen yang meliputi foto kopi :

a). KTP Suami dan Istri

b). Daftar Gaji dari Dana Pensiun

c). NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Nomor pokok wajib pajak, dimana sekarang ini setiap pemberian kredit terus dipantau oleh Bank Indonesia adalah NPWP-nya.

d). Skep Pensiun Asli

e). Untuk nasabah yang pengajuan pinjaman diatas 300 juta wajib melampirkan foto usaha dan laporan keuangan yang berbentuk neraca dan laporan laba rugi

3). Penilaian dapat dilakukan untuk sementara adalah dari take home pay gaji pension dan neraca serta laporan laba-rugi terkhusus bagi nasabah yang kegunaan pinjamannya untuk menambah modal usaha yang ada dengan menggunakan rasio – rasio sebagai berikut :

a). Current ratio

b). Acid test ratio

c). Inventory turn over

d). Sales to receivable ratio

e). Profit margin ratio

f). Return on net worth

g). Working capital

b. Penyelidikan Berkas Pinjaman yang dilakukan oleh Pemrakarsa kredit

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar, termasuk menyelidiki keabsahan berkas. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau belum cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

c. Menganalisa Kredit dan Wawancara Awal

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam. Tujuannya adalah meyakinkan bank apakah berkas – berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Hendaknya dengan wawancara ini dibuat sesantai mungkin, sehingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Berikan si debitur berbicara lebih banyak, sehigga bank memperoleh informasi yang lebih banyak pula.

d. Kewenangan memutus kredit apabila hasil On The Spot telah sesuai dengan data yang diajukan pada awal kredit.

Disini merupakan bagian yang penting untuk memutuskan layak dan tidak layaknya suatu pengajuan kredit diteruskan prosesnya,dengan melalukan On The Spot yaitu merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara I. Pada saat melakukan *on the spot* hendaknya jangan diberi tahu kepada nasabah. Sehingga apa yang kita lihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

e. Wawancara II dengan mengaikan type,struktur dan syarat kredit dan mencocokkannya pada hasil On The Sport.

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan – kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

f. Keputusan Kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah administrasinya. Biasanya keputusan kredit yang akan diumumkan mencakup:

1). Jumlah uang yang diterima.

2). Jangka waktu kredit.

3). Biaya – biaya yang harus dibayar.

4) Waktu pencairan kredit.

Keputusan kredit biasanya merupakan keputusan tim. Begitu pula bagi kredit yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing – masing.

g. Penandatanganan Akad Kredit / Perjanjian Lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan :

1). Antara bank dengan debitur secara langsung atau

2). Dengan melalui notaris (pinjaman diatas 100 juta).

Dengan begitu sistem pengendalian manajemen dalam proses pemberian kredit sangatlah perlu diperhatikan agar kredit yang diberikan dapat berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak bank. Menurut Arief Suadi (2012 : 8 - 9) sistem pegendalian manajemen adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa anak sistem yang saling berkaitan, yaitu : pemrograman, penganggaran, akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban untuk membantu manajemen mempengaruhi orang lain dalam sebuah perusahaan, agar mau mencapai tujuan perusahaan melalui strategi tertentu secara efektif dan efisien. Pemrograman dan penganggran merupakan proses dari sistem pengendalian manajemen,

sedangkan pertanggungjawaban merupakan struktur dari pengendalian manajemen.

h. Pencairan Kredit

Pencairan Kredit merupakan hasil akhir dari disetujuinya akad kredit dengan menerima jumlah kredit yang telah disetujui dan dokumen yang berisih Persetujuan perjanjian kredit oleh kreditur dan debitur, dalam hal ini kreditur dan debitur telah saling setujuh dan sepakat untuk membuat perjanjian kredit dengan ketentuan ketentuan yang telah diterangkan dalam proses akad kredit,adapun dokumen yang diberikan kepada nasabah setelah akad dan pencairan merupakan bukti sah atas pencairan Fasilitas Kredit.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiono (2010 :11) jenis penelitian ini berdasarkan tingkat eksplanasinya dibagi tiga macam, yaitu:

1. Penelitian Deskriptif

   Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable lain.

2. Penelitian Komparatif

   Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan, yang variabelnya masih sama dengan penelitian variable mandiri tetapi yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda.

3. Penelitian Asosiatif

   Penelitian Asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variable atau lebih.

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian komparatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui serta membandingkan kebijakan manajemen dalam proses pemberian kredit Pensiun yang ada pada PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk. Kantor Cabang Palembng dengan kebijakan manajemen dalam proses pemberian kredit secara umum.

b. Lokasi Penelitian

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. Kantor Cabang Palembang yang beralamat di JL. Jendral Sudirman No 16 Palembang 30126. 0711-360548, Fax 0711-360549.

c. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variable yaitu suatu definisi yang diberikan kepada suatu variable dengan cara memberi arti bagaimana variable tersebut digunakan untuk menjelaskan operasional variable dalam penelitian.

Tabel III.1

Operasionalisasi Variabel,Definisi dan Indikator

No	Variabel	Definisi	Indikator
1	Kebijakan Manajemen	Merupakan pernyataan manajemen untuk menuju kepada Visi dan Misi yang diperkirakan dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu dan hasilnya dapat diukur.	a. Pemasaran Kredit Pensiun. b. Persyaratan Administratif bagi calon debitur. c. Permohonan dan Pemrakarsa Kredit.
2	Proses pemberian kredit Pensiun yang Sehat pada Btpn	Cara yang ditetapkan oleh BTPN dengan maksud untuk mempermudah debitur dalam pemberian kredit pension serta mengawasidalam pelaksanaannya .	d. Analisa Kredit dan pengumpulan informasi mengacu hasil on the spot. e. Penerapan Prosedur Penyelamatan Kredit bermasalah. f.Pengawasan Kegiatan Operasional dilapangan untuk kevalidan data.

Sumber : Penulis 2015

d. Data Yang diperlukan

M Iqbal Hasan (2010:33) menyatakan bahwa data ditinjau dari cara memperolehnya, Yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya. Data primer disebut juga data asli atau data baru.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan – laporan penelitian yang terdahulu. Data sekunder disebut juga data yang tersedia.

Data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang sudah tersedia, yaitu berupa :

a. Gambaran umum perusahaan

b. Struktur Organisasi dan Sejarah Singkat Perusahaan

c. Uraian deskripsi pekerjaan dari masing – masing bagian dalam proses pemberian kredit Bank Tabungan Pensiunan Nasional Kantor Cabang Palembang.

d. Formulir, bukti dan catatan yang berhubungan dengan proses pemberian kredit Bank Tabungan Pensiunann Nasional Kantor Cabang Palembang.

e. Teknik Pengumpulan data

Menurut Riduan (2010: 25-31), teknik pengumpulan data meliputi :

1. Pengamatan (Observasi)

   Pengamatan atau observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilaksanakan.

2. Angket

   Angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang bersedia memberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna.

3. Wawancara

   Wawancara adalah cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya

4. Tes

   Tes adalah serangkaian pertannyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individual atau kelompok.

5. Dokumentasi

   Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi buku – buku yang relevan, peraturan – peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film documenter, data yang relevan penelitian.

Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan (observasi) dan wawancara serta dokumentasi yang berhubungan dengan kebijakan manajemen dalam proses pemberian Kredit Pensiun.

f. Analisis Data dan Teknik Analisis

Menurut Kuncoro (2009:124), metode penelitian data dan teknik analisis ada dua,yaitu:

1. Metode Kualitatif

   Metode kualitatif adalah metode analisis data yang tidak dapat diukur dalam suatu skala numeric atau angka.

2. Metode Kuantitatif

   Metode kuantitatif adalah metode analisis data yang diukur dalam suatu skala numeric atau angka.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan metode kualitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk mengetahui kebijakan manajemen dalam proses pemberian kredit pada pinjaman Kredit Pensiun di PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk. Kantor Cabang Palembang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat PT. Tabungan Pensiun Nasional Tbk.

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (Persero) adalah peursahaan yang bergerak di bidang perbankan, yang berdiri sejak 1958 dan berkantor pusat di jakarta (sebelumnya di Bandung). Berstatus Bank Non Devisa PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (Persero) Tbk. Mulai berdiri pada 5 Februari 1958 di Bandung oleh 7 orang yang peduli dengan kondisi pensiunan TNI dan sipil.

Awalnya bank ini dibentuk untuk melayani para pensiunan personil Angkatan Bersenjata dengan nama Bank Pegawai Pensiunan Militer (BAPEMIL). 16 Februari 1986 BAPEMIL diubah namanya menjadi Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) hingga saat ini. Status BTPN meningkat dari bank tabungan menjadi bank umum dengan dikeluarkannya ijin usaha pada tahun 1993.

Tahun 1997 BTPN diakuisisi oleh Bank Nusa Nasional (BNN) dan Bakrie Group. Tahun 2002 BPPN/ IBRA mengambil alih kepemilikan BNN di BTPN. Tahun 2003 Bakrie Group menjual kepemilikannya kepada PT. Recapital, PT. Danatama Makmur, dan Fuad Hasan Masyhur. BTPN menjadi perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada bulan Maret 2008. Pemegang saham utama BTPN, TPG Nusantara S.a.r.I adalah

perusahaan investasi yang dimiliki oleh TPG (Texas Pasific Group - perusahaan investasi global dariAmerika Serikat) dengan kepemilikan saham sebesar 71,6%, sedangkan kepemilikan publik sebesar 28,4%. Kini selama lebih dari 50 tahun BTPN memfokuskan layanan perbankannya untuk para pensiunan bekerja sama dengan PT. Tabungan Asuransi Pensiunan, PT. Taspen, dan PT. Pos Indonesia.

2. Visi dan Misi PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk.

Visi, misi dan tujuan dari PT. Bank Tabungan Pembangunan Nasional Tbk., adalah sebagai berikut:

a. Visi

Menjadi bank mass market terbaik, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia.

b. Misi

Bersama, kita ciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti.

c. Nilai

1) Dapat dipercaya

a) Berkata dan berbuat sesuai dengan pikiran dan hati nurani.

b) Belajar dan berlatih terus menerus untuk menjadi kompeten di bidangnya, sesuai standar terbaik dan terkini.

2) Peduli

a) Fokus pada kepentingan stakeholder dan senantiasa mengerti sebelum dimengerti.

b) Memenuhi kebutuhan stakeholder seutuhnya secara tulus.

3) Sinergi

Menjadikan perbedaan sebagai kekuatan bersama untuk mencapai hasil yang lebih baik.

4) Mencapai yang terbaik

a) Memulai hari dengan tujuan dan mengakhiri hari dengan hasil dan pembelajaran.

b) Bekerja dengan sepenuh hati, rajin, pantang menyerah, dan focus pada apa yang bisa kita lakukan.

c) Bersyukur, senantiasa meningkatkan standar kinerja terbaik

3. Struktur Organisasi PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk. Kc Palembang.

Struktur organisasi dibentuk agar dapat menyajikan gambaran yang jelas dan lebih sempurna mengenai susunan dan hubungan bidang-bidang kerja serta posisi jabatan yang terdapat pada suatu perusahaan. Struktur organisasi dapat juga menjadi acuan fungsi bagi setiap karyawan sebagai bidang-bidang kerja yang memiliki tanggung jawab dan wewenang yang jelas, sehingga koordinasi dalam perusahaan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

Gambar IV. 1
Struktur Organisasi PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.
Kc Palembang.

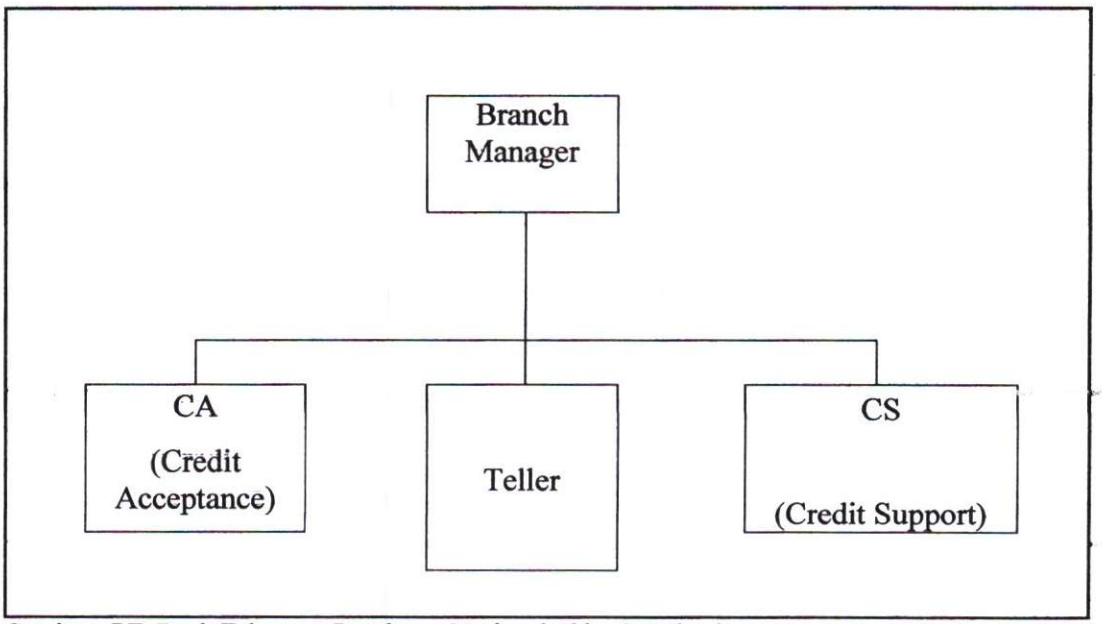

Sumber : PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. Kc Palembang

4. Uraian Tugas dan Wewenang Dalam Proses Pemberian Kredit PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk. Unit Kc Palembang.

a. Branch Manager

Tugas dan Tanggung Jawab :

1). Memimpin kantor cabang dalam rangka menjamin kelancaran operasional BTPN.

2). Pengembangan bisnis dan sales BTPN Unit di wilayah kerjanya untuk mencapai laba yang maksimal.

3). Mengevaluasi / memonitor bisnis BTPN di wilayah kerjanya untuk mengetahui posisi BTPN dibandingkan Bank pesaing lainnya.

4). Mengelola manajemen kas BTPN dicabang untuk kelancaran operasional serta terjadinya kelebihan kas.

5). Melakukan pembinaan terhadap nasabah pinjaman dan simpanan.

6). Melakukan pelayanan prima untuk mencapai kepuasan nasabah dan keamanan Bank.

7). Mengendalikan sistem administrasi pembukuan BTPN dicabang untuk keamanan dan pelayanan operasional.

8). Memeriksa semua kelengkapan bukti kas dan dokumen lainnya setiap akhir kerja.

9). Mengawasi kelancaran pelayanan kepada nasabah dan secara aktif memantau kegiatan nasabah.

10). Merencanakan logistik BTPN di wilayah kerjanya untuk mencapai tingkat efisiensi dan efektifitas yang maksimal.

b. CA/ Credit Acceptance

Tugas dan Tanggung Jawab :

1). Melayani pinjaman kredit bagi pegawai, pra pensiun, pensiunan.

2). Melakukan pemeriksaan kredit bagi pegawai, pra pensiun, pensiunan yang dilakukan oleh nasabah.

3). Memproses dan mengusulkan permintaan pinjaman nasabah.

4). Bertanggung jawab atas pengisian data serta perhitungan simpanan dan pinjaman.

5). Bertanggung jawab atas pembayaran kembali kredit tepat waktu.

6). Menagih tunggakan pinjaman apabila sudah jatuh tempo atau telat dari

jatuh tempo pembayaran angsuran kredit.

7). Menyampaikan hasil kunjungan pembinaan nasabah atau calon nasabah kepada Branch Manager dalam rangka memperluas jangkauan dan pelayanan.

c. Teller

Tugas dan Tanggung Jawab :

1). Memberikan pelayanan kepada nasabah atau calon nasabah dengan se-baik – baiknya untuk kepentingan bisnis BTPN.

2). Melayani keperluan nasabah dalam pengiriman uang (transfer), setoran tunai, menghitung uang, penarikan uang dan penukaran uang.

3). Pengurusan kas bersama Branch Manager untuk mengamankan asset Bank.

4). Memastikan kelancaran, ketepatan pelayanan, penerimaan setoran, pembayaran nasabah untuk kepentingan bisnis BTPN.

5).Menyetorkan setiap kelebihan maksimum kas selama jam kerja dan me-Nyetorkan sisa kas pada akhir hari ke kas induk untuk keamanan kas BTPN cabang.

6). Memastikan keamanan dan kecocokan uang kas yang ada dalam ruang teller untuk kelancaran pelayanan asabah.

7). Memastikan kelengkapan bukti – bukti kas tunai yang berada dalam pengawasannya untuk menghindari penyimpangan kas teller.

8). Membuat register kas teller untuk tertib administrasi.

9). Manfaat bayar tunai sesuai dengan kewenangannya.

10). Memegang kunci Brangkas yang ada di BTPN Kc Palembang.

d. CS / Credit Support

Tugas dan Tanggung Jawab :

1). Menata usahakan register simpanan untuk mencegah kerugian Bank.

2). Menata usahakan register yang berkaitan dengan proses pelayanan pinjaman untuk kelancaran pengelolaan pinjaman.

3). Menata usahakan register pemberantasan tuggakan untuk mendukung kelancaran kegiatan pemberantasan tunggakan.

4). Meneliti dokumen – dokumen, pengarsipan bukti – bukti pembukuan Dan mengelola penyimpanan berkas pinjaman dan simpanan untuk tertib administrasi.

5). Menyimpan berkas pinjaman dan agunan dalam rangka pengamanan asset Bank.

6).Memberikan pelayanan administrasi kepada nasabah atau calon nasabah yang akan mempergunakan jasa perbankan lainnya di BTPN dengan sebaik – baiknya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah.

7). Konfirmasi kesediaan nasabah untuk membuka rekening baru.

8). Membuat dan mengadministrasikan laporan – laporan BTPN untuk keperluan penentuan kebijakan manajemen yang disampaikan kepada kepala Area.

9). Membuat nota – nota untuk perhitungan utang piutang likuiditas.

5. Kebijakan manajemen dalam perkreditan di BTPN, Yaitu :

a. Dalam rangka mempertahankan sistem dan prosedur pemberian kredit yang baik, maka di Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Kanca Palembang terdapat pemisahan pejabat kredit berdasarkan bidang tugasnya yaitu pejabat kredit bidang Relationship Management (RM) , yang bertanggung jawab atas *credit* relationship serta upaya pengembalian pinjaman *performing loan.* Dan pejabat kredit bidang *Credit Risk management (CRM)*, yang bertanggung jawab atas pengendalian risiko kredit, manajemen portofolio kredit dan pengelolaan kredit bermasalah.

Selain itu juga terdapat pemisahan tugas pada satuan kerja perkreditan (jajaran CM dan CRM), yaitu Pejabat Kredit Lini (PKL), yang memiliki tugas dan tanggung jawab menyangkut putusan pemberian fasilitas kredit, restrukturisasi dan penyelesaian kredit bermasalah. Berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya, PKL dibagi lagi menjadi dua yaitu Pejabat Pemrakarsa Kredit dan Pejabat Pemutus Kredit . Selain PKL juga terdapat Pejabat Kredit Support, yang merupakan pejabat pendukung bagi PKL dan tidak memiliki wewenang dalam membuat putusan kredit.

b. Terdapat penerapan Four Eyes Principle, yaitu suatu prinsip dalam pelaksanaan kewenangan kredit (memutus kredit) yang harus dilakukan bersama oleh minimal dua PKL, yang salah satu atau kedua-duanya mempunyai limit kewenangan yang cukup.

c. Terdapat penetapan pasar sasaran , sehingga pemberian kredit dapat dilakukan secara lebih terarah dan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki BTPN sehingga dapat memberikan keuntungan yang optimal.

d. Terdapat kebijakan tertulis yang telah disetujui Direksi mengenai perkreditan yang memuat :

1). Ketentuan mengenai limit pemberian persetujuan Kantor Cabang.

2). Ketentuan mengenai jenis kredit yang dilarang.

3). Ketentuan mengenai jangka waktu kredit (maksimum / minimum).

4). Ketentuan tingkat bunga.

5). Ketentuan jumlah maksimum penyediaan keseluruhan fasilitas kredit yang akan diberikan oleh BTPN.

6). Ketentuan mengenai perbandingan antara kredit dengan jaminan, informasi keuangan yang harus diperoleh dari debitur, dan pengertian kredit bermasalah, pengelolaan kredit bermasalah.

e. Terdapat pejabat perkreditan BTPN yang kompeten yang akan memproses kredit.

f. Terdapat fungsi *review* atau pengawasan terhadap kredit yang telah diberikan dan manajemen selalu memonitor pelaksanaanya.

g. Kredit yang diberikan selalu ditutupi / di - *cover* dengan jaminan kebendaan yang memadai. BTPN melarang pemberian kredit kepada calon debitur yang mengajukan permohonan kredit tanpa jaminan.

h. Pejabat kredit melakukan usaha Bank to Bank Information atas calon debiturnya. Hal ini dilakukan agar pihak BTPN mengetahui informasi calon debitur, apakah calon debitur tersebut merupakan debitur Bank lain atau calon debitur tersebut merupakan debitur yang kreditnya ter- golong kredit macet/ *Black List dengan cara BI Chaking.*

i. Adanya penetapan Kriteria Risiko yang Dapat Diterima (KRD), yang bertujuan untuk meminimalkan risiko kredit dan mengoptimalkan keuntungan BTPN.

6. Prosedur dalam proses pemberian Kredit Pensiun pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. Kc Palembang.

Prosedur Pemberian kredit adalah tahapan yang harus dilalui sebelum kredit diberikan, tujuanya untuk menilai kelayakan calon debitur. Dalam prosedur pemberian Kredit Pensiun, langkah-langkah yang harus dilakukan baik oleh pihak bank maupun debitur adalah mulai dari pengajuan permohonan kredit sampai dengan tahap pencairan kredit.

Berikut ini adalah prosedur dari pemberian Kredit Pensiun pada Bank Tabungan Pensiunan Naional, Kantor Cabang Palembang yaitu :

1. Pemasaran Kredit Pensiun SEJAHTERA

Untuk menjamin agar pemasaran Kredit Pensiun Sejahtera agar lebih baik dan target kinerja dapat terlampaui, maka pemasaran Kredit Pensiun Sejahtera menjadi tanggung jawab semua Pejabat

Kredit Lini (PKL) di jajaran bisnis Kantor Cabang, yaitu Pemimpin cabang, ASH, ASL dan BM.

2. Persyaratan Administratif Bagi Calon Debitur adalah :

a. Menyerahkan foto copy KTP atau kartu identitas lainnya dan foto copy Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku serta harus dicocokkan dengan aslinya.

b. Sk Pensiun Asli dan dilampirkan surat keterangan gaji dari Dana Pensiun Terkait.

c. Mengingat karakteristik yang beragam diberbagai wilayah, maka perlu ditegaskan kembali bahwa persyaratan di atas adalah syarat minimal, artinya dengan memenuhi syarat tersebut di atas kepada calon debitur sudah dapat dilayani Kredit Pensiunnya.

d. Terhadap dokumen kredit cukup dilakukan di bawah tangan, tidak perlu dilegalisasi / diwarmeking.

3. Permohonan dan Pemrakarsa Kredit

a. Pengajuan permohonan kredit dilakukan oleh debitur / terjamin.

b. Bagi Permohonan Pinjaman Baru Pensiunan atau Prapensiun Wajib Dilakukan BI Chaking guna untuk mengetahui apakah nasabah tersebut high risk/non high risk.

c. Pada prinsipnya pelayanan Kredit Pensiun Sejahtera ini berdasarkan asas domisili tempat tinggal. Namun demikian, apabila calon nasabah tidak berdomisili di wilayah BTPN Cabang, maka BTPN Cabang Pembantu yang berada dalam wilayah domisili

tempat calon debitur diperbolehkan memberikan Kredit Pensiun dengan memperhatikan :

1). Kepastian asal domisili yang dibuktikan dengan menyerahkan fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya tempat asal yang masih berlaku dan dicocokkan dengan aslinya.

2). PKL di BTPN Cabang harus melakukan konfirmasi dengan BTPN Kantor Cabang Pembantu di wilayah kerja tempat asal calon debitur, misalnya mengenai informasi pinjaman maupun kepastian alamat domisili tempat tinggal calon debitur.

d. Proses pendaftaran dan pengisisan formulir pada dasarnya dilakukan oleh CA / petugas yang ditunjuk. Namun demikian untuk mempermudah / mempercepat pelayanan,Branch Manager dapat membantu untuk proses pendaftaran / pengisian formulir tersebut pada saat melakukan kunjungan di lapangan. Formulir yang telah diisi tersebut selanjutnya tetap diserahkan ke CA / petugas yang ditunjuk untuk dimulai proses kelengkapan administrasi.

e. pada prinsipnya pelaksanaan pelayana Kredit Pensiun tetap mengacu kepada Jaminan dan Gaji Pensiun, tetapi dengan beberapa ketentuan dan persyaratan yang lebih ringan yang disesuaikan dengan kondisi atau pola kebutuhan dalam rangka memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan.

4. Analisa Kredit

a. Analisa kredit dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan dan kemauan debitur / terjamin membayar kembali kreditnya.

b. Hasil analisa dituangkan dalam formulir Kredit Pensiun sebagai dasar pertimbangan bagi Pemutus dalam memberikan putusan kredit.

5. Agunan

a. Agunan Pokok.

Agunan kredit dapat hanya berupa agunan pokok berupa obyek yang dibiaya dalam hal ini SK Pensiun.

b. Agunan Tambahan

Agunan tambahan, seperti tanah / bangunan, kendaraan, tidak wajib dipenuhi. Apabila calon debitur menyerahkan agunan tambahan, maka terhadap agunan tersebut tidak dilakuan pengikatan.

c. Apabila terdapat agunan kredit, maka atas agunan tersebut wajib diasuransikan kreditnya apabila debitur meninggal.

6. Type, Struktur dan Syarat Kredit

Type, struktur dan syarat kredit disesuaikan dengan jenis kedit.

7. Kewenangan Memutus Kredit

Untuk putusan Kredit Pensiun tetap diputus oleh pejabat pemutus yang memiliki Wewenang cukup tanpa dikaitkan / dipengaruhi oleh ratio dan KBK BTPN ybs.

8. Formulir

a. Formulir pendaftaran, laporan kunjungan nasabah, analisis, evaluasi Kredit Pensiun dan putusan agar menggunakan formulir yang telah disediakn untuk ditetapkan.

b. Apabila format formulir Kredit Pensiun yang ada tidak cukup untuk mencantumkan seluruh data /keterangan tentang debitur, maka data atau keterangan tersebut dapat dicantumkan pada halaman sebaliknya / halaman tambahan dan diparaf oleh pemrakarsa dan pemutus.

c. Pengadaan fomulir Kredit Pensiun diserahkan ke masing – masing Area BTPN sesuai kebutuhan dengan berdasarkan pada rata – rata realisasi Kredit Pensiun di Area tersebut.

9. Pencairan Kredit

Pencairan kredit yang diminta debitur hanya dapat dilakukan bank setelah debitur yang bersangkutan memenuhi beberapa syarat seperti yang dituangkan dalamperjanjian kredit dan memo pencairan kredit.

a. Mempersiapkan rekening.

b. Pencairan dana.

7. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Pada Prosedur Permohonan Kredit :

a. Personil kompeten dan dapat dipercaya.

Pejabat perkreditan BTPN yang menangani proses permohonan kredit mengetahui syarat-syarat serta data kredit yang harus dipenuhi oleh calon debitur, antara lain :

1). Mengetahui jenis kebutuhan pembiayaan yang diperlukan debitur.

2). Mengetahui jenis kredit Bank yang cocok untuk pembiayaan calon debitur tersebut.

3). Mengetahui syarat-syarat kreditnya serta data yang dipenuhi calon debitur berkaitan dengan pembiayaan tersebut.

4). Mengetahui prosedur teknis proses kredit dan pengklasifikasian warna kredit. Untuk meyakinkan bahwa personil menangani kredit tersebut kompeten, bisa dilihat dari latar belakang pendidikan serta *training* yang pernah diperoleh.

b. Pemisahan Tugas.

Adanya pemisahan tugas antara petugas yang menerima dan mencatat Surat Permohonan Kredit dari calon debitur, yang dalam hal ini dilakukan oleh CS / Customer Service, dengan petugas yang melakukan penilaian awal (Pre Screening) dan menetapkan warna kreditnya, yang dalam hal ini dilakukan oleh Pejabat Pemrakarsa (CA / Credit Acceptance).

c. Prosedur Otorasi yang Tepat

Prosedur otorisasi merupakan aspek penting dalam prosedur permohonan kredit. Dalam hubungan ini adalah telah dipenuhinya persyaratan pelaksanaan prosedur sesuai yang ditetapkan dalam buku Pedoman Kredit misalnya otorisasi pada proses kredit atau semua data calon debitur yang dibutuhkan diserahkan ke BTPN.

d. Dokumen dan Catatan yang Memadai

Setiap permohonan kredit baru, perpanjangan jangka waktu,perubahan jumlah, perubahan struktur, tipe dan syarat kredit harus berdasarkan adanya permohonan kredit secara tertulis dari calon debitur/debitur dengan mengisi formulir permohonan kredit sesuai dengan standar yang berlaku dan ditandatangani oleh pemohon disertai dengan dokumen-dokumen untuk kelengkapan permohonan kredit. Pejabat Pemrakarsa (CA / Credit Accaptanc) telah mengecek dan meneliti kelengkapan dari persyaratan dan data-data yang dibutuhkan untuk dianalisa, yang meliputi berbagai aspek antara lain, aspek keuangan, aspek yuridis, teknis dan sebagainya. Serta dokumen dan catatan administrasi cukup untuk pelaksanaan pengelolaan permohonan kredit calon debitur untuk proses selanjutnya.

e. Kontrol Fisik Aktiva dan Catatan

Kontrol fisik aktiva dan catatan pada tahapan permohonan kredit hanya sebatas pada pemeriksaan kelengkapan syarat-syarat permohonan

kredit. Pejabat pemrakarsa harus meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan calon debitur/debitur dalam permohonan kredit.

8. Penerapan Prinsip Kehati - Hatian pada Prosedur Analisis dan Evaluasi Kredit.

a. Personil Kompeten dan Dapat Dipercaya

1). Pejabat kredit yang akan melakukan analisa dan evaluasi kredit pada BTPN mempunyai pengetahuan tentang Pasar Sasaran (PS) dan Kriteria Risiko Kredit Yang Dapat Diterima (KRD) yang telah disahkan oleh Direksi.

2). Pejabat kredit BTPN mempunyai kesadaran bahwa dalam menganalisa dan mengevaluasi kredit, pejabat bank tidak boleh terpengaruh oleh permintaan - permintaan dari pihak manapun yang dapat berpengaruh dalam penilaian.

3). Pejabat kredit BTPN yang menganalisa dan mengevaluasi permohonan kredit harus mempunyai sikap mental obyektif, jujur, cermat dan seksama.

4). Pejabat kredit BTPN mempunyai pengetahuan yang memadai,Sesuai dengan bidangnya yang digunakan dalam melakukan analisis.

b. Prosedur Otorisasi yang Tepat

Prosedur otorisasi dalam proses analisis dan evaluasi permohonan kredit yang menyangkut penerapan prinsip kehati-hatian adalah penting,

maka pada BTPN proses otorisasi telah dilakukan oleh yang berwenang berdasarkan tingkatannya, sehingga batasan dari wewenang Satuan Kerja Perkreditan jelas dan tegas.

c. Dokumen dan catatan yang memadai

1). Data yang dijadikan dasar untuk informasi, analisis, evaluasi dan keputusan kredit Btpn harus terjamin ketepatan, kebenaran dan kelengkapannya oleh Pejabat kredit Btpn sehingga hasil penilaian tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan yang tepat dalam memutus kredit.

2). Dokumen dan catatan administrasi cukup untuk pelaksanaan pengelolaan permohonan kredit calon debitur serta untuk kegunaan proses mutasi gaji.

3). BTPN menyediakan fasilitas atau sarana yang diperlukan untuk menyimpan dokumen – dokumen perkreditan secara aman dan tertib.

4). Kontrol fisik aktiva dan catatan Pejabat Pemrakarsa harus mencari data dan informasi antara lain melalui wawancara dengan pemohon, kunjungan ke lokasi pemohon, wawancara dengan pihak-pihak lain yang mengetahui karakter pemohon, bisnis pemohon, dana pensiun pemohon dan keaslian data dan Sk Pensiun serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan, penyelidikan tentang tujuan penggunaan kredit. Selain itu juga melakukan kunjungan ke lokasi agunan pemohon (Dana

Pensiun) untuk mengetahui kebenarannya dan menilai agunan serta yang tidak kalah pentingnya pejabat pemrakarsa juga.

9. Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pada Prosedur Pencarian Kredit

a. Personil kompeten dan dapat dipercaya

Pejabat Kredit BTPN mempunyai kesadaran bahwa profesionalisme perbankan merupakan tuntutan bagi pejabat bank dalam penguasaan kondisi peminjam, obyektifitas dari analisa/putusan yang diambil, kemandirian dalam mengambil sikap/putusan, pemahaman aspek legal perkreditan dan ketertiban pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan.

b. Prosedur otorisasi yang tepat

Pencairan kredit dapat dilakukan setelah formulir ditandangani oleh Pejabat yang berwenang yaitu oleh atasan langsung petugas CS / Credit Support.

c. Dokumen dan catatan yang memadai

Dalam pencairan kredit aspek yang bersangkutan dengan dokumentasi dan catatan administrasi Bank adalah dokumentasi harus sesuai dengan catatan administrasinya terutama menyangkut:

1). Kelengkapan standar dari paket kredit sesuai dengan kebijakan dan ketentuan BTPN.

2). Kelengkapan - kelengkapan standar dari Surat Perjanjian Kredit (SPK) beserta Lampiranya.

3). Kelengkapan standar registrasi dalam administrasi bank atas semua transaksi debitur telah dilakukan dengan benar dan baik.

4). Kelengkapan tanda pengikatan jaminan serta penguasaan bukti pemilikan telah dipenuhi. Dalam hubungan ini, debitur / calon debitur hanya bisa melakukan pencairan bila semua dokumentasi kredit telah diisi dan ditandatangani secara lengkap.

d. Kontrol fisik aktiva dan catatan

Pejabat kredit telah meyakini bahwa pencairan kredit yang dilakukan oleh debitur / calon debitur memang digunakan untuk transaksi yang sesuai dengan apa yang disebutkan nasabah pada saat akad kredit yang ditetapkan BTPN dengan memperhatikan kebutuhan keuangan debitur.

10. Kesesuaian Prosedur Pemberian Kredit Bank Tabungan Pensiun Nasional Kantor Cabang Palembang Dengan Undang-Undang Perbankan.

a. Bank Tabungan Pensiun Nasional Cabang Palembang telah menerapkan prinsip kehati - hatian dalam proses pemberian kreditnya pada masyarakat sesuai dengan Undang – Undang RI No.7 Tahun 1992 Pasal 2 tentang Perbankan.

b. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan – pembiayaan berdasarkan Prinsipnya, Bank Tabungan Pensiun Nasional Cabang Palembang mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk

melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai yang diperjanjikan (Undang - Undang RI No. 10 Tahun 1998 Pasal 8 tentang Perbankan).

c. Segala bentuk pendokumentasian yang berhubungan dengan data-data perkreditan nasabah telah terjamin ketepatan, kebenaran , serta kelengkapannya.

d. Kegiatan yang terjadi pada Bank Tabungan Pensiun Nasional telah memenuhi kegiatan atau usaha – usaha dari Bank Umum sesuai dengan Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 Pasal 6 tentang usaha - usaha dari bank umum.

e. Adanya pemisahan tugas yang tepat dan karyawan atau petugas yang kompeten dalam melaksanakan tugasnya serta dapat dipercaya.

B. Pembahasan Hasil Analisis

Berdasarkan hasil analisis pelaksanaan proses pemberian Kredit Pensiun yang diterapkan oleh PT. Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, penulis menemukan beberapa kelemahan diantaranya :

1 . Kurang Efektifnya cara pemasaran Kredit Pensiun yang dilakukan oleh Btpn,dimana pemasaran yang dilakukan mengecuh kepada pegawai pra-pensiun yang credit risknya lebih besar dan pertanggung jawaban dipegang oleh semua pejabat kredit di Area.

2 . Persyaratan Administratif bagi calon debitur yang tidak begitu mengikat dimana yang menjadi dasar hanyalah Sk Pensiun dan Surat perjanjian kredit yang tidak begitu mengikat,sehingga masih ada saja debitur nakal yang bebas

memindahkan gaji pensiunnya kekantor bayar lain,sehingga terjadi kolektabilitas dibtpn.

3 . Berdasarkan data-data pendukung yang didapat dibank btpn cabang Palembang,ditemukan permohonan kredit pension oleh debitur yang menggunakan KTP Sementara dan Surat domisili dari Rt setempat dimana oleh pemrakarsa kreditdisetujui kreditnya,sedangkan pada saat ini terdapat banyak permasalahan atas diajukannya kredit yang menggunakan KTP Sementara dan Surat domisili tersebut yaitu tidak validnya alamat tersebut,sehinnga nasabah yang bersangkutan susah ditemui untuk pengisian surat tanda bukti diri tahunan dan terstopnya gaji pension yang bersangkutan karena jarang mengambil gaji.

4 . Berdasarkan Analisa Kredit Kurangnya pengumpulan informasi dari lapangan untuk mengetahui sumber ekonomi dan pengeluaran konsumtif bulanan calon debitur / debitur secara objektive sehingga tidak dapat memperkirkan berapa maximal angsuran yang harus dipotong dari manfaat pensiunnya sebagai kewajiban debitur tersebut, sehingga peluang debitur high risk sangat tinggi, dikarenakan nasabah bisa saja memindahkan gajinya kebank lain agar memperoleh gaji utuh/full,seperti yang telah terjadi di BTPN baru-baru ini sepanjang tahun 2014-2015 berdasarkan data yang didapat dari BTPN Kantor Cabang Palembang Telah terjadi 7 Kasus pemindahan gaji yang dilakukan oleh nasabah yang mempunyai pinjaman di BTPN. yang menjadi acuan maksimal angsuran adalah hanya peraturan yang ada dibtpn serta Kurangnya kontrol mutasi gaji yang harus diketahui pihak instansi. Untuk Kredit Pensiun pemotongan yang dilakukan oleh bendahara yang berada diinstansi-instansi yang gaji pensiunnya

tidak bisa dipindahkan ke BTPN juga kurang dikontrol, sehingga ketika debitur telah memasuki masa angsuran gaji belum juga terpotong dan termutasi dan menyebabkan kredit macet, sering kali Bank hanya menganalisa terpaku pada nilai agunan saja serta gaji. Padahal sangat penting untuk memperhatikan serta menilai hal tersebut, karena itu merupakan acuan pihak Bank untuk mengetahui sumber utama angsuran kredit bagi calon debitur / debitur untuk dapat melunasi kredit berikut bunga yang dibebankan sebesar yang telah ditentukan oleh pihak Bank yang harus dibayar oleh debitur tersebut serta mempertimbangkan kebutuhan konsumtif bulanannya sehingga antara angsuran dan sisa gaji dapat seimbang dengan kebutuhan sehari-hari. Jika hal ini tidak dipertegas untuk dihindari atau dianggap remeh oleh pihak Bank, maka akan terjadi hal yang berdampak pada prediksi :

a. Penurunan omset (condition of ekonomi).

b. Cash Flow (Capital) .

Dampak tersebut akan mengakibatkan kredit yang dijalani tidak berjalan lancar (kredit macet) . Tidak hanya itu, kesulitan untuk melunasi pinjaman pun akan terjadi. Ini berakibat Bank akan mengalami kerugian.

Tabel IV. 1

Kurangnya pengumpulan informasi dari lapangan pada proses pemberian kredit dapat dilihat pada data berikut :

Penyebab Kredit Macet	Lancar	DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
Penurunan omset	0 %	30 %	37 %	46 %	60,9 %
Cash Flow	0 %	40 %	19 %	12 %	17,1 %

Sumber : Kantor BTPN Cabang Palembang 2015

5 . Kurangnya penerapan prosedur penyelamatan pada kredit bermasalah. Karena tindakan ini merupakan salah satu upaya untuk mengurangi bahkan mencegah terjadinya kredit macet. Apabila penerapan prosedur penyelamatan pada kredit bermasalah tidak dilakukan, maka jumlah kredit macet akan terus bertambah.Berikut bentuk penyelamatan kredit bermasalah yang dimaksud :

a. *Reschedule*,yaitu penyelamatan dengan cara perubahan jadwal angsuran

b. *Restruktur*, yaitu penyelamatan dengan cara perubahan jangka waktu menjadi lebih panjang agar jumlah angsuran mengecil.

c. *Grace Period*, yaitu media pembekuan kredit bermasalah karena terjadinya musibah.

d. *Cut Lost*, yaitu pemotongan sebagaian jumlah angsuran pokok pada kredit macet, agar kredit tersebut dapat dilunasi debiur.

Tabel IV. 2

Persentase penggunaan media penyelamatan kredit macet yang telah dilakukan pada PT.Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. Kc Palembang sebagai berikut :

Media Penyelamatan	Total Kolektibilitas (Rp)	% Penggunaan	Rupiah
Reshcedule	522.626.953.969	1,73 %	9.041.446.303
Retruktur	522.626.953.969	2,65 %	13.849.614.280
Grace Periode	522.626.953.969	1,13 %	5.905.684.579
Cut Lost	522.626.953.969	2,75 %	14.372.241.234

Sumber : Kantor BTPN Cabang Palembang 2015

6 . Berdasarkan analisa yang telah dilakukan penulis, tidak semua kantor Cabang PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional mempunyai Sales Support Supervisor yang dapat bertugas untuk mengawasi jalannya kegiatan operasional dilapangan. Sistem pengawasan bank yang efektif memerlukan penetapan tanggung jawab dan tujuan yang jelas bagi setiap lembaga yang terkait dengan tugas – tugas pengawasan bank. Masing - masing lembaga harus memiliki independensi operasional dan sumber daya yang cukup. Sistem pengawasan bank yang efektif sekurang-kurangnya mencakup bentuk pengawasan di tempat. Dalam kebijakan yang terdapat dalam Bank Tabungan Pensiunan Nasional, penempatan fungsi Sales Support Supervisor dalam mengawasi kegiatan Operasional masih bergantung kepada potensi pinjaman besar di wilayah yang bersangkutan. Tidak terdapatnya fungsi Sales

Support Supervisor dalam Bank Tabungan Pensiunan Nasional menyebabkan fungsi operasional unit yang dijalankan oleh CS *(customer service)* dan *teller* tidak dapat dikendalikan dan diawasi secara optimal. Dana operasional kas yang dimiliki oleh BTPN Cabang juga tidak dapat dikelola secara maksimal.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Beberapa simpulan yang dapat diambil dari hasil pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pada BTPN Kantor Cabang Palembang setiap pemberian kredit harus berdasarkan surat permohonan secara tertulis yang ditandatangani oleh pemohon. Permohonan dituangkan dalam formulir permohonan kredit sesuai standar pada BTPN.

Penadatanganan pendaftaran permohonan kredit diBTPN dilakukan oleh CS / Custome Service. Pada tahap ini dimana dokumen persyaratan kredit yang berupa laporan keuangan nasabah dibuat oleh pihak bank secara estimasi berdasarkan gaji pensiun dan hasil wawancara pihak bank dengan nasabah untuk nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk penghitungan maksimal pinjaman dan angsuran yang bisa diberikan.

Pengumpulan informasi yang meliputi kegiatan lapangan untuk mengetahui kebenaran data yang disampaikan pemohon kredit dilakukan oleh pejabat berwenang. Rangkaian prosedur tersebut berada di bawah pengawasan Branch Manager. Namun pengumpulan informasi nasabah tersebut cenderung ditekankan pada jaminan yang digunakan oleh nasabah untuk memperoleh kredit dalam hal ini Sk Pensiun.

Prosedur dan kebijakan pemberian kredit secara garis besar pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional telah sesuai dengan Undang-Undang Perbankan atas dasar pengevaluasian dan keefektifan dalam hal penyaluran kredit bagi masyarakat terutama para pensiunan.

Persetujuan pencairan kredit setelah formulir kredit ditandatanagani oleh Branch Manager dan setelah dilakukan pemeriksaan pemenuhan dan kelengkapan dokumen diisyratkan di dalam putusan kredit Kredit bermasalah dapat disebabkan oleh salah satu atau banyak faktor yang harus dikenali secara dini karena adanya unsur kelemahan baik dari sisi debitur maupun sisi intern BTPN.

B. Saran

Sebaiknya BTPN mempertegas penerapan prinsip kehati - hatian dengan cara menambahkan atau membuat kertas kerja baru kepada tim audit internal atau eksternal yang lebih detail dalam pemeriksaan proses pemberian kredit. Serta meningkatkan pengawasan langsung dari manajemen / dewan komisaris dalam pelaksanaan audit unit terkhusus proses pemberian kredit,sehingga pelaksanaan Pemberian kredit di cabang akan jauh lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit.

Sebaiknya BTPN memisahkan fungsi AO sebagai marketing dan analisis kredit. Karena penggabungan fungsi tersebut membuat BTPN tidak fokus dalam mencari nasabah dan menganalisis pemberian kredit sehingga penerapan prinsip kehati – hatian tidak sepenuhnya terjadi.

Diharapkan Bank Tabungan Pensiunan Nasional menempatkan supervisor (pengawas) disetiap kantor cabang Bank Tabungan Pensiunan Nasional. Adanya Sales Support Supervisor dapat lebih mengkoordinasikan, mengawasi kegiatan operasional BTPN Cabang baik mengelola kas, mengawasi dan mengendalikan pelayanan BTPN cabang demi kelancaran operasional dan pelayanan BTPN Cabang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sumber daya manusia merupakan aspek yang paling penting, oleh karena itu diperlukan pegawai yang kompeten dan dapat dipercaya. Berdasarkan hal ini, pihak BTPN perlu :

a. Memempatkan pegawai yang berkualitas, bertanggung jawab, jujur, dan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan.

b. Menempatkan pegawai ke jabatan yang lebih tinggi berdasarkan profesionalisme, integritas, dan kemampuan yang dimilikinya dan bukan berdasarkan senioritas dari pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

Arief Suadi,2012. **Sistem Pengendalian Manajemen**.Penerbit BPFE,Yogyakarta

Buku Panduan Kredit Pensiun PT.Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.

http://zhaliberrghazli.blogspot.com/2014/03/bank-tabungan-pensiunan nasional.html?m=1

Kasmir, 2012. **Dasar – Dasar Perbankan**. Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Khadijah Nurani (2013), Analisis Kebijakan Pemberian Kredit dan Pengaruh LDR,CAR dan NIM Terhadap NPL Pada Bank Perkreditan Rakyat. *Jurnal Ekonomi (http:// Jurnal Ekonomi.ac.id//repository/view of gunadarma.html)*

Kuncoro, 2009. **Metode Penelitian Akuntansi**, BPFE, Yogyakarta

Lin, Nan Ahli Bahasa W.Lulo.2012. **Metodelogi Penelitian,**PT Gramedia Widiak-sana Indonesia

Mulyadi. 2010. **Sistem Akuntansi.**Penerbit Erlangga, Jakarta.

Mulyadi. 2012. **Sistem Akuntansi Perbankan.** Penerbit Erlangga, Jakarta

Puspani. 2010. **Penerapan Prosedur dan Kebijakan Pemberian Kredit** Universitas Airlangga Surabaya.

Ria Riski (2013), Tinjauan Atas Analisis Kebijakan Piutang untuk mengurangi Piutang Tak Tertagih pada Bank Pekreditan Rakyat. *Jurnal Ekonomi.* Vol.1, No.1 *(http://journal.ac.id/index.php/jurnal ekonomi).*

Riduan R. Sunjaja dan Inge Barlian. 2010. **Manajemen Keuangan,** PT. Prenhallindo, Jakarta.

Sugiono, 2010. **Metodologi Penelitian Bisnis,** Penerbit CV Alfabeta : Jakarta.

Sutejo, Siswanto. 2010. **Strategi manajemen kredit bank umum**. Jakarta. PT. Damar Mulia Pustaka.

Tawaf, 2009. **Kebijakan Perkreditan Bank**, Penerbit BPFE, Yogyakarta

Tri Wahyuni (2012), Pelaksanaan Analisis Pemberian Kredit diBank Haga Cab Semarang, *Jurnal ekonomi, Vol.21,No 9 (http://Journal.ac.id//index.php/jurnal ilmu ekonomi.html).*

bank btpn

omor : SRT-03203/C.1.3/PLG/130715
al : **Surat Keterangan Penelitian**
ampiran : -

ang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Oppon M Hutabarat
Jabatan : Branch Manager

engan ini menerangkan bahwa:

Nama : Tri Wulandari
Nim : 22 2011 306 M
Fakultas : Ekonomi
Universitas : Universitas Muhammadiyah Palembang

dalah benar telah melakukan penelitian di Perusahaan kami sejak 08 Juni 2015 sampai dengan nggal 13 Juli 2015 dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul:

Analisis Kebijakan Managemen Dalam Proses Pemberian Kredit Pensiun PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk Kantor Cabang Palembang"

emikian Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

lembang, 13 Juli 2015
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk

PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL KANTOR CABANG 218.031 PALEMBANG

pon M Hutabarat
Branch Manager

Bersama,
kita ciptakan kesempatan tumbuh
dan hidup yang lebih berarti

[redacted]OS INDONESIA (PERSERO)
KANTOR POS PALEMBANG

DAFTAR KWITANSI BTPN TAK TERTAGIH PENSIUN TASPEN / ASABRI
BULAN JUNI 2015

NO	NAMA PENSIUN	KANTOR BAYAR	NOPENS	JENIS	BSU (Rp)	KETERANGAN
1	RUKMINENY JD SYAMSUDD	PLJ	13164105600	1112	842,667	BELUM AMBIL
2	RUKMINENY JD SYAMSUDD	PLJ	13164105600	1112	842,667	BELUM AMBIL
3	ZAZULI	PLJ	13080264900	7211	1,529,967	BELUM AMBIL
4	RUSDI	PLJ	16003172200	1111	1,992,499	BELUM AMBIL
5	ROSIPAH	PGLB	13071527500	7212	746,645	BELUM AMBIL
6	ASIAH JD SUTRISNO	PGKT	71000878900	1112	1,004,055	BELUM AMBIL
7	TJIK UNG BIN MUCHTAR	BAS	[illegible]004012600	1211	1,846,335	BELUM AMBIL
8	HAYUDA	PGKT	160022600400	1112	951,467	BELUM AMBIL
9	MEGAWATI	BAS	44001322900	7212	966,666	STOP DAPEM
10	SAINANI	SPP	13044873800	7212	1,163,333	
11	ZANARIAH	PGPK	44000338700	7211	2,528,333	DAPEM DI PG KENTEN
12	WAIDA	TUS	D4900082550	3112	691,667	STOP DAPEM
13	BURHANUDDIN	TGY	14000714700	1211	1,512,333	LAIN LAIN
14	PONI SETYASIH	PGKP	[illegible]	7212	1,265,334	STOP DAPEM
15	SAODAH	PGKP	1[illegible]00823[illegible]00	1112	592,000	BELUM AMBIL
16	NILAWATI	PGKP	15022759180	1112	639,982	
17	SITI ZUBAEDAH	PGKR	200321002420	3112	376,778	STOP DAPEM
18	ROHANI	PGMR	201421002430	3112	935,483	
19	MUHAMMAD RASYAD	PGMR	200121018380	3111	1,660,002	
20	I KAMALUDDIN H	PGMR	982104669	1311	714,663	
21	ROGAYAH	SKY	44000296800	7212	1,011,333	MENINGGAL
22	MAISAROH	CPO	13018204200	1112	931,222	STOP DAPEM
23	SOPIAH	TNL	15011555800	1112	691,610	MENINGGAL
24	WINDA	PG	20041108374	3112	1,245,001	STOP DAPEM
25	SOEGIARTO S	PG	200611000936	3111	2,803,332	STOP DAPEM
26	CHAIRIL MALIK MM IRH	PG	44001726900	7211	1,783,272	STOP DAPEM
27	SUKIYEM JD WAGIMIN	PG	12003385900	1112	608,238	MENINGGAL
28	M YUNUS AZIZ	PG	13052794300	1111	1,670,500	STOP DAPEM
29	KHALIK A	PG	44000542400	7211	1,757,658	[illegible]INAS
30	SRI UMIJATI	PG	D4900277980	3112	881,783	BELUM AMBIL
31	SRI UMIJATI	PG	D4900277980	3112	881,783	BELUM AMBIL
32	AYUNIS	PG	20041104863	3112	883,201	BELUM AMBIL
33	AYUNIS	PG	20041104863	3112	883,201	BELUM AMBIL
34	ED HAJANI	PG	20041105506	3112	434,456	BELUM AMBIL
35	SUNARYANI	PG	20051103921	3112	917,334	BELUM AMBIL
36	KASIRAH	PG	201311098980	3112	797,000	BELUM AMBIL
37	RETI ERYANI	PG	19972101668	1312	768,333	BELUM AMBIL
38	ROHAYA	PG	20032102041	1312	774,667	BELUM AMBIL
39	PAIDJO	PG	20092100439	3112	842,093	BELUM AMBIL
40	SALMIYATI	PG	20081400713	3412	1,217,334	BELUM AMBIL
41	SALMIYATI	PG	20081400713	3412	1,217,334	BELUM AMBIL
42	ASRARI	PG	20102100928	3411	2,075,002	BELUM AMBIL
43	DJURIAH	PG	20032400155	1312	719,334	BELUM AMBIL
44	SUTARNI	PG	20082400206	1312	691,610	BELUM AMBIL
45	NANDIATI	PG	20031401583	3412	968,333	BELUM AMBIL
46	KASTINI JD ANNAN N	PG	2006140007	3412	789,334	BELUM AMBIL
47	KASTINI JD ANNAN N	PG	2006140007	3412	789,334	BELUM AMBIL
48	TOYIBA	PG	20091403091	3412	1,615,003	BELUM AMBIL
49	LAILI KADARIAH	PG	20081403370	3412	784,584	BELUM AMBIL
50	NOLEK	PG	13100424900	7212	387,778	BELUM AMBIL
51	SUNIARTI	PG	38002560900	7212	830,000	BELUM AMBIL
52	SYARKONO MB NUR	PG	44000719700	7211	2,232,917	BELUM AMBIL
53	THANTOWI	PG	44001785400	7211	1,563,328	BELUM AMBIL
54	THANTOWI	PG	44001785400	7211	1,563,328	BELUM AMBIL
55	SOBRI H LANI	PG	44001002800	7211	1,557,001	BELUM AMBIL
56	RASUNA	PG	16001410300	1112	847,750	BELUM AMBIL
57	RASUNA	PG	16001410300	1112	847,750	BELUM AMBIL
58	HASANAH	PG	12001017800	1112	923,168	BELUM AMBIL
59	RUSMINI INGSUN	PG	O1015573700	1112	840,584	BELUM AMBIL
60	YURNANI JD H TOHA	PG	O1007081400	1112	853,999	BELUM AMBIL
61	SITI ASIH	PG	13033026700	1112	1,004,000	BELUM AMBIL
62	FATNUN NUNAIYAH	PG	150115455600	1112	846,762	BELUM AMBIL
63	FATNUN NUNAIYAH	PG	150115455600	1112	846,762	BELUM AMBIL
64	NYAYU AMNAH	PG	O4002594100	1112	772,750	BELUM AMBIL
65	AHMAD ZULKARNAIN	PG	13107490600	1112	885,334	BELUM AMBIL

[redacted]	SITI JOHARIYAH	PG	15007148200	1112	1,217,938	BELUM AMBIL
67	ROMZAH	PG	13034491300	1112	633,937	BELUM AMBIL
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						
101						
102						
103						
104						
105						
106						
107						
108						
					72,890,576	

Pihak B T P N
D t o.

Palembang, 21 JUNI 2015
Kaur Pensiun

M.S WIBOWO
Nippos : 965258713

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

AKREDITASI

INSTITUSI PERGURUAN TINGGI	Nomor : 027/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014	(B)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)	Nomor : 044/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2014	(B)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)	Nomor : 044/SK/BAN-PT/Ak-XIII/S1/II/2011	(B)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D3)	Nomor : 005/BAN-PT/Ak-X/Dpl-III/VI/2010	(B)

fe.umpalembang.ac.id Email : febumplg@umpalembang.ac.id

lamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711) 511433 Faximile (0711) 518018

بسم الله الرحمن الرحيم

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Tanggal	:	Rabu, 12 Agustus 2015
	:	16.00 – 18.30 WIB
	:	Tri Wulandari
	:	222011306 M
n	:	Akutansi
Kuliah Pokok	:	**Sistem Pengendalian Manajemen**
	:	**ANALISIS KEBIJAKAN MANAJEMEN DALAM PROSES PEMBERIAN KREDIT PENSIUN PT.BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk KANTOR CABANG PALEMBANG.**

H DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN RKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA

No	NAMA DOSEN	JABATAN	TANGGAL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1.	Mizan, SE, M.Si.Ak.,CA	Pembimbing	2/9 -2015	
2.	Drs. Sunardi,SE,M.Si	Ketua Penguji	01 - 09 - 2015	
3.	Betri Sirajuddin,SE.Ak,M.Si,CA	Ang. Penguji I	01 - 09 . 2015	
4.	Mizan,SE,M.Si,Ak.,CA	Ang. Penguji II	19 - 8 - 2015	

Palembang, Agustus 2015
Dekan
u.b Ketua Program Studi Akuntansi

Rosalina Ghazalie, SE., M.Si
NIDN/NBM: 0228115802/1021961

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Unggul dan Islami

Sertifikat

441/J-10/FEB-UMP/SHA/VII/2015

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA	:	**TRI WULANDARI**
NIM	:	**222011306.m**
PROGRAM STUDI	:	**Akuntansi**

Yang dinyatakan **HAFAL / TAHFIDZ** (21) Surat Juz Amma
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, 28 Juli 2015
an. Dekan
Wakil Dekan IV

toni, M.H.I.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LEMBAGA BAHASA
Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263
Telp. (0711) 512637 - Fax. (0711) 512637
email. lembagabahasaump@yahoo.co.id

TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD

Name	:	Tri Wulandari
Place/Date of Birth	:	Palembang, July 06th 1993
Test Times Taken	:	+1
Test Date	:	July 26th, 2015

Scaled Score

Listening Comprehension	:	48
Structure Grammar	:	61
Reading Comprehension	:	49
OVERALL SCORE	:	526

Palembang, July 27th, 2015
Head of Language Institute

Rini Susanti, S.Pd.,M.A
NBM/NIDN. **1164932/0210098402**

NO. 299/TEA FE/LB/UMP/VI/2015

125 certificates

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263
Telp. (0711) 512637 - Fax. (0711) 512637 – email.
lembagabahasaump@yahoo.co.id

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

SURAT KETERANGAN

No. 127 / Abstract/LB/UMP/VII/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Masagus Sulaiman, S.Pd.,M.Pd.

Status : Dosen Tetap Yayasan FKIP UMP Program Studi Bahasa Inggris

NIDN : 0203107901

Alamat : Jl. Padmajaya RT.2 RW.04 Palembang

No. Telpon : 081278781709

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa dengan:

Nama : Tri Wulandari

NIM : 222011306

Judulskripsi :Analisis Kebijakan Manajemen Dalam Proses Pemberian Kredit Pensiun PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk Kc Palembang

Telah dikoreksi terjemahan abstraknya sehingga telah memenuhi kriteria penulisan abstrak dalam Bahasa Inggris.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 28 Juli 2015

LEMBAGA BAHASA
Univ. Muhammadiyah Palembang

Msg.Sulaiman, S.Pd.,M.Pd

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

STATUS TERAKREDITASI

بسم الله الرحمن الرحيم

PIAGAM

No.259/H-4/LPKKN/UMP/IX/2014

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palembang menerangkan bahwa :

Nama	: Tri Wulandari
Nomor Pokok Mahasiswa	: 22 2011 306. M
Fakultas	: Ekonomi
Tempat Tgl. Lahir	: Palembang, 06-07-1993

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-7 yang dilaksanakan dari tanggal 16 Juli sampai dengan 2 September 2014 bertempat di:

Kelurahan/Desa	: Tanjung Laut
Kecamatan	: Suak Tapeh
Kota/Kabupaten	: Banyuasin
Dinyatakan	: LULUS

Palembang, 15 September 2014

Mengetahui
Rektor

Dr. H. M. Idris, S.E., M.Si.

Ketua LPKKN

Ir. Alhanannasir, M.Si.

بسم الله الرحمن الرحيم

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

AMA MAHASISWA :	**Tri Wulandari**	PEMBIMBING	
IM :	**22 2011 306.M**	KETUA :	**Mizan, S.E, M.Si, Ak., CA**
ROGRAM STUDI :	**Akuntansi**	ANGGOTA :	

JDUL SKRIPSI : **ANALISIS KEBIJAKAN MANAJEMEN DALAM PROSES PEMBERIAN KREDIT PENSIUN PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk. KANTOR CABANG PALEMBANG**

O.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	22/7 2015	Bab I s/d IV	[illegible]		Perbaiki sesuai
2					dg saran.
3					
4	25/7 2015	Bab I s/d IV	[illegible]		Acc lanjut
5					Bab V & lengkapi
6					
7	27/7 2015	Bab V	[illegible]		perbaiki lagi.
8					
9	29/7 2015	Bab V (skripsi)	[illegible]		Acc U/ Sidang
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

ATATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang

Pada tanggal : / /

a.n. Ketua

Program Studi

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

BIODATA PENULIS

Nama	: Tri Wulandari
NIM	: 22.2011.306 M
Fakultas	: Ekonomi
Program Studi	: Akuntansi
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang, 06 Juli 1993
Alamat	: JL. Kh Azhari Lrg Tenang Menanti No.500, 16 Ulu Palembang
Telepon	: 0821 8229 6671
Nama Orang Tua	
Ayah	: Darwin Si
Ibu	: Suryana
Pekerjaan Orang Tua	
Ayah	: Swasta
Ibu	: Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua	: JL. Kh Azhari Lrg Tenang Menanti No.500, 16 Ulu Palembang